

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Manggarai Barat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Manggarai Barat pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip, prosedur, dan ketentuan yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019. Proses pengeluaran kas dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi dengan baik, dimulai dari penyusunan anggaran kas, penerbitan SPD, pengajuan SPP, penerbitan SPM, hingga pencairan dana melalui SP2D. Semua tahapan tersebut telah terintegrasi dalam penggunaan aplikasi SIPD, yang mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Efektivitas Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada BKAD tergolong cukup efektif. Efektivitas ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas antarbidang, prosedur pelaksanaan yang sistematis dan terdokumentasi, penyusunan laporan keuangan yang umumnya tepat waktu.

Namun demikian, efektivitas sistem masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek verifikasi internal, serta disiplin OPD dalam menyerahkan dokumen pengajuan secara tepat waktu.

3. Efisiensi Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem dinilai cukup efisien, yang ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi SIPD untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. Kendati demikian, terdapat potensi peningkatan efisiensi, terutama melalui penguatan koordinasi antar bidang dan antara BKAD dengan OPD, peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan OPD dalam penyerahan dokumen keuangan, dan penyederhanaan proses verifikasi berulang yang masih memakan waktu.

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

BKAD telah melaksanakan pengawasan internal secara berlapis, namun perlu ditingkatkan pada aspek verifikasi dokumen agar lebih ketat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidaksesuaian dengan SAP yang harus segera ditindaklanjuti.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

BKAD diharapkan secara berkelanjutan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai dalam penguasaan sistem aplikasi SIPD maupun pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi pelaporan.

2. Perbaikan Koordinasi dengan OPD

Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antara BKAD dan setiap OPD terkait dalam hal penyusunan, pengajuan, dan pelengkapan dokumen pengeluaran kas, sehingga proses pencairan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai rencana kas.

3. Penguatan Fungsi Verifikasi dan Pengawasan

Disarankan agar tim verifikasi internal diperkuat dengan prosedur yang lebih rinci dan kontrol berlapis sebelum pencairan dana, guna menghindari kesalahan administratif dan penyimpangan.

4. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

BKAD perlu memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia dalam SIPD agar seluruh proses pengeluaran kas dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini perlu dijaga dari risiko human error melalui pengawasan rutin dan pembaruan data yang konsisten.

5. Evaluasi Rutin terhadap Sistem Akuntansi

Evaluasi berkala terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, serta dinamika kebutuhan pelayanan public.